

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI SDN 90 RAKADUA KABUPATEN BOMBANA

Hasnawati¹; Laode Turi²; Surianto Ilham³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jln. Pemuda No. 339, Tahoa, Kolaka, Sulawesi Tenggara 93561
E-mail : : hasnawati@usn.ac.id (Koresponding)

Abstract: This study aims to analyze the recording and reporting processes for the School Operational Assistance (BOS) fund and their impact on the accountability of financial reporting at SDN 90 Rakadua, Bombana Regency. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews with BOS fund administrators, and a review of school financial documents. The results indicate that recording is conducted on a real-time, cash basis supported by orderly transaction documentation, while reporting is integrated with the ARKAS application and submitted quarterly in accordance with BOS technical guidelines. Adherence to these procedures fosters strong vertical accountability to the Education Office, as confirmed by the alignment between the Inspectorate's review findings and actual conditions in the field. However, horizontal accountability toward students' parents and the community remains limited to internal meetings and lacks open public disclosure. The study recommends enhancing external transparency to complement the existing, well-functioning administrative governance.

Keywords: *Record-keeping, Reporting, BOS Funds, Accountability*

Pemerintah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sebagai konsekuensi dari kewajiban konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945. Salah satu instrumen kebijakan untuk mewujudkan amanat tersebut adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program yang telah berjalan sejak tahun 2005 guna mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun. Dana BOS dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional non-personalia satuan pendidikan, mulai dari penyediaan bahan ajar hingga pemeliharaan sarana prasarana sekolah, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik pada masing-masing jenjang.

Sebagai gambaran, Petunjuk Teknis (Juknis) BOS tahun 2022 menetapkan satuan biaya per peserta didik per tahun yang berbeda pada setiap jenjang pendidikan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Jenjang Sekolah	Satuan Biaya BOS Tahun 2022
SD/SDLB	Rp800.000/peserta didik/tahun
SMP/SMPLB	Rp1.000.000/peserta didik/tahun
SMA/SMK/SMALB	Rp1.400.000/peserta didik/tahun

Tabel 1. Satuan Biaya BOS Tahun 2022 (Sumber: Juknis BOS 2022)

Besarnya dana yang dikelola sekolah menuntut adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang tertib sebagai prasyarat akuntabilitas. Dalam praktiknya, sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di berbagai daerah masih menghadapi kendala. Pramita (2015) menemukan bahwa realisasi penggunaan dana BOS pada sejumlah SMA Negeri di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya sesuai dengan pelaporan yang dibuat, sementara Mellani (2016) mencatat bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Gombong masih diwarnai keterlambatan penyampaian

laporan pertanggungjawaban akibat sentralisasi kewenangan pada kepala sekolah. Riseda (2022) menambahkan bahwa pelaporan dana BOS pada tingkat dinas pendidikan kota kerap terkendala pada sinkronisasi data antarsatuan pendidikan, sedangkan Wulan (2021) menyoroti pentingnya keterbukaan informasi keuangan sekolah dasar sebagai prasyarat kepercayaan publik. Persoalan yang mengemuka dari rangkaian studi tersebut umumnya bukan pada besaran dana yang diterima, melainkan pada sejauh mana proses administrasi keuangan mampu dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

SDN 90 Rakadua, Kabupaten Bombana, sebagai salah satu satuan pendidikan penerima dana BOS, menghadapi tantangan serupa. Pengelolaan anggaran di sekolah ini selama ini diputuskan melalui kesepakatan internal tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah, tanpa melibatkan orang tua siswa secara langsung. Minimnya publikasi informasi penggunaan dana di ruang publik, seperti papan pengumuman sekolah, berpotensi membuka celah ketidaktransparanan dan menyulitkan masyarakat mengakses informasi keuangan sekolah. Kondisi ini penting dicermati mengingat Jumianti (2018) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS sangat dipengaruhi oleh konsistensi sekolah dalam mempublikasikan laporan penggunaan dana kepada wali murid.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya berhenti pada deskripsi kepatuhan administratif semata, penelitian ini berupaya menghubungkan secara eksplisit dua tahap dalam siklus akuntansi sekolah, yakni pencatatan dan pelaporan, dengan capaian akuntabilitas pada dua dimensinya sekaligus: akuntabilitas vertikal kepada pemerintah dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat. Titik inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian ini dibandingkan studi sejenis yang pernah dilakukan Sri Hartatik (2018) maupun

Monika Jayatri (2012), yang cenderung berfokus pada satu sisi akuntabilitas saja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana proses pencatatan dan pelaporan anggaran dana BOS dilaksanakan di SDN 90 Rakadua, dan bagaimana proses tersebut berhubungan dengan akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan mekanisme pencatatan dan pelaporan dana BOS serta menganalisis pengaruhnya terhadap akuntabilitas keuangan di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi praktis bagi sekolah dalam memperbaiki tata kelola dana BOS, menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dalam merancang kebijakan pendampingan, serta memperkaya kajian akuntansi sektor publik pada level satuan pendidikan dasar yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan kajian pada instansi pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menghasilkan gambaran mendalam mengenai fenomena pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas dana BOS berdasarkan data lapangan (Sugiyono, 2016). Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang diteliti melibatkan proses sosial dan interaksi antarpengelola dana yang tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi ukuran statistik, sejalan dengan pandangan Strauss dan Corbin (2013) bahwa penelitian kualitatif relevan untuk mengungkap makna di balik suatu praktik organisasi.

HASIL

Gambaran Umum Objek Penelitian

SDN 90 Rakadua merupakan satuan pendidikan dasar negeri yang berlokasi di Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan jumlah peserta didik sebanyak 183

siswa. Sekolah ini mengusung visi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri, yang diterjemahkan ke dalam sejumlah misi, antara lain melaksanakan pembelajaran secara efektif dan inovatif, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya bangsa, serta menjalin kerja sama yang harmonis antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dana BOS menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, khususnya pada aspek pembiayaan operasional non-personalia.

Pengelolaan dana BOS di sekolah ini melibatkan struktur yang jelas: Kepala Sekolah bertindak sebagai penanggung jawab tim BOS yang memberikan arahan dan melakukan verifikasi transaksi, Bendahara menjalankan fungsi teknis administratif pembukuan, sementara Operator Sekolah mengelola input data pada aplikasi ARKAS. Komite Sekolah dilibatkan sebagai representasi orang tua yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberi masukan atas prioritas penggunaan anggaran. Pembagian peran ini pada dasarnya mencerminkan upaya sekolah menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) yang lazim digunakan dalam pengendalian internal keuangan sektor publik, meskipun skala penerapannya menyesuaikan dengan sumber daya manusia yang tersedia di lingkup sekolah dasar.

Pencatatan Anggaran Dana BOS

Pencatatan transaksi dana BOS di SDN 90 Rakadua dilakukan secara konsisten menggunakan basis kas, yaitu setiap transaksi dibukukan pada saat kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Bendahara sekolah menegaskan bahwa pencatatan dilakukan sesegera mungkin setelah transaksi berlangsung agar tidak terjadi selisih antara saldo buku dan saldo fisik.

“Kami menerapkan basis kas, setiap transaksi dicatat saat uang tunai masuk atau keluar.”

Prinsip *no budget, no spending* menjadi acuan utama, di mana setiap pengeluaran hanya direalisasikan apabila telah tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan didukung

bukti fisik berupa kuitansi dan nota belanja asli. Sebagai ilustrasi, catatan Buku Kas Umum bulan Februari 2020 memperlihatkan penerimaan tahap pertama dana BOS sebesar Rp48.600.000 yang kemudian direalisasikan untuk honor guru, alat tulis kantor, dan kebutuhan operasional lain secara bertahap, dengan saldo yang selalu dapat ditelusuri hingga rupiah terakhir.

Seluruh transaksi dicatat berjenjang mulai dari Buku Kas Umum sebagai sumber data utama (*original entry*) hingga buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Analisis terhadap buku pembantu pajak menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, di mana sekolah secara disiplin memungut PPh/PPN atas belanja barang dan jasa serta menyetorkannya tepat waktu, sehingga tidak ditemukan tunggakan pajak pada akhir periode pelaporan.

Pelaporan Anggaran Dana BOS

Pelaporan dana BOS di SDN 90 Rakadua telah beralih dari sistem manual menuju sistem digital melalui aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), yang disampaikan secara triwulanan ke laman BOS daring. Kepatuhan pelaporan ini menjadi prasyarat pencairan dana tahap berikutnya, sehingga keterlambatan input data berpotensi menghambat arus kas operasional sekolah pada periode selanjutnya.

“Sejauh ini tidak ada kendala berarti, baik penyusunan fisik maupun pelaporan daring.”

Data transaksi yang telah dicatat pada Buku Kas Umum disinkronkan ke sistem ARKAS, sehingga setiap tarikan tunai pada rekening koran harus sejalan dengan pembukuan bendahara sebelum dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana. Mekanisme ini menciptakan semacam sistem *check and balance internal*: jika terdapat selisih sekecil apa pun antara bukti fisik dan catatan sistem, laporan tidak dapat diunggah ke sistem nasional, sehingga bendahara terdorong untuk senantiasa menjaga akurasi data sebelum periode

pelaporan berakhir.

Pertanggungjawaban Dana BOS

Akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan dibangun melalui pembagian tugas yang jelas antara Kepala Sekolah, Bendahara, dan Tata Usaha, serta pelibatan Komite Sekolah dalam penyusunan RKAS. Ketua Komite menyampaikan bahwa pihak sekolah secara aktif meminta masukan mengenai prioritas belanja.

“Sekolah sangat terbuka, kepala sekolah selalu meminta saran kami mengenai prioritas belanja.”

Bukti pertanggungjawaban administratif diperkuat oleh hasil reuiu Inspektorat yang menyatakan kesesuaian antara kondisi fisik pekerjaan dan laporan keuangan, serta pencatatan aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang (KIP). Setiap barang yang dibeli menggunakan dana BOS, seperti perangkat komputer atau printer, langsung diinput ke dalam daftar inventaris, sehingga nilai manfaatnya tetap tercatat sebagai kekayaan sekolah meskipun anggarannya telah habis dibelanjakan. Dalam hal pengawasan eksternal, sekolah juga menunjukkan sikap proaktif terhadap audit, di mana setiap temuan segera ditindaklanjuti.

Meski demikian, publikasi informasi keuangan kepada masyarakat luas masih terbatas pada forum rapat internal dan belum menjangkau media informasi terbuka seperti papan pengumuman sekolah. Kekhawatiran akan timbulnya “kegaduhan” akibat sensitivitas data keuangan menjadi salah satu alasan pihak sekolah menahan diri dari publikasi yang lebih terbuka kepada wali murid secara luas.

Ringkasan ketiga temuan di atas disajikan pada Tabel 2.

Aspek	Temuan Utama
Pencatatan	Basis kas real-time, berjenjang BKU–buku pembantu, bukti fisik lengkap.
Pelaporan	Terintegrasi ARKAS, triwulanan, sinkron dengan rekening koran.

Aspek	Temuan Utama
Pertanggungjawaban	Kuat secara vertikal (reviu Inspektorat); horizontal masih terbatas.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian (Sumber: Data Diolah, 2026)

PEMBAHASAN

Konsistensi penerapan basis kas di SDN 90 Rakadua sejalan dengan karakteristik akuntansi sektor publik yang menekankan pada gambaran likuiditas riil suatu entitas pada periode tertentu. Pencatatan yang dilakukan secara real-time terhadap setiap transaksi merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko selisih kas, sekaligus menjawab kekhawatiran awal mengenai potensi salah kelola anggaran. Kelengkapan bukti fisik yang menyertai setiap transaksi juga memperkuat posisi laporan keuangan sekolah agar dapat diverifikasi kebenarannya oleh pihak berkepentingan, sebagaimana ditekankan Priansa (2017) bahwa laporan keuangan sektor publik harus andal, jujur, dan auditabel.

Temuan mengenai kelengkapan arsip data keuangan, mencakup bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fisik maupun rekening koran, memperkuat hasil penelitian Rima Ujimaviati (2019) yang menegaskan bahwa dokumentasi pendukung yang lengkap adalah kunci utama meminimalkan temuan negatif ketika audit dilakukan. Ketersediaan arsip yang tertata rapi di SDN 90 Rakadua terbukti memudahkan Inspektorat dalam melacak aliran dana, sehingga proses pemeriksaan dapat diselesaikan dengan relatif cepat dan tidak berlarut-larut.

Integrasi pelaporan manual ke sistem ARKAS menunjukkan adaptasi teknologi yang mendukung efektivitas pelaporan keuangan sekolah, sejalan dengan temuan Wardah Ges Alamudy (2020) bahwa keberhasilan pelaporan dana BOS sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan alat pencatatan digital. Mekanisme check and balance antara Buku Kas Umum dan sistem

daring turut menjadi instrumen kontrol yang mendorong ketelitian bendahara, karena selisih sekecil apa pun akan menghambat proses pelaporan ke tingkat pusat. Temuan ini juga memperkuat hasil kajian Riseda (2022) bahwa digitalisasi pelaporan dana BOS efektif menekan potensi kesalahan pencatatan manual, sepanjang didukung kesiapan teknis pengelola di tingkat satuan pendidikan.

Dari sisi akuntabilitas, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pencatatan dan pelaporan yang tertib telah membangun akuntabilitas vertikal yang kuat kepada Dinas Pendidikan, sejalan dengan konsep akuntabilitas keuangan Mardiasmo (2012) yang menekankan bahwa integritas pengelola dana publik diuji melalui kemampuan mempertanggungjawabkan perolehan serta penggunaan dana secara jujur kepada otoritas yang lebih tinggi. Suasana kerja yang kondusif antara Kepala Sekolah, Bendahara, dan Tata Usaha turut menjadi faktor pendukung utama (foster factor) yang menjaga konsistensi akuntabilitas administratif, sebagaimana juga disinggung Mellani (2016) bahwa konflik internal sering kali menjadi penyebab utama kegagalan pelaporan keuangan sekolah.

Namun demikian, akuntabilitas horizontal kepada masyarakat masih menjadi titik lemah. Pelibatan Komite Sekolah dalam penyusunan RKAS memang telah mencerminkan praktik partisipatif dan sejalan dengan indikator pengungkapan (disclosure) yang disyaratkan dalam akuntabilitas finansial, tetapi belum diikuti dengan keterbukaan informasi kepada publik yang lebih luas. Kekhawatiran akan sensitivitas isu keuangan yang mendorong pihak sekolah menahan diri dari publikasi terbuka justru berpotensi melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat, sejalan dengan pengamatan Jumianti (2018) bahwa keterbukaan informasi merupakan variabel penting yang sering luput dalam pengelolaan dana BOS di berbagai daerah. Sri Hartatik (2018) turut menekankan bahwa laporan dana BOS idealnya tidak hanya memenuhi kepatuhan administratif kepada pemerintah, tetapi juga menjadi alat komunikasi publik yang membangun

kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Secara teoretis, temuan ini memperkaya pemahaman bahwa ketertiban administratif dan akuntabilitas publik merupakan dua konstruk yang tidak selalu berjalan beriringan; sebuah entitas dapat memiliki tata kelola pencatatan yang sangat baik namun tetap memiliki celah pada dimensi transparansi eksternal. Secara praktis, temuan ini mengisyaratkan bahwa penguatan akuntabilitas sekolah dasar penerima dana BOS perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kepatuhan teknis semata, tetapi juga pada keberanian melakukan disclosure yang lebih terbuka kepada wali murid dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang sah atas penggunaan dana pendidikan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini relevan bagi Dinas Pendidikan selaku pembina teknis satuan pendidikan. Pendampingan yang selama ini berfokus pada aspek teknis aplikasi ARKAS perlu diperluas mencakup penguatan kapasitas sekolah dalam mengomunikasikan informasi keuangan kepada publik, misalnya melalui pelatihan penyusunan ringkasan laporan yang mudah dipahami oleh orang tua siswa. Bagi sekolah, langkah sederhana seperti menempelkan ringkasan realisasi anggaran pada papan informasi atau menyampaikannya melalui grup komunikasi wali murid dapat menjadi titik awal memperkuat akuntabilitas horizontal tanpa memerlukan investasi sumber daya yang besar.

SIMPULAN

Proses pencatatan dan pelaporan anggaran dana BOS di SDN 90 Rakadua telah dilaksanakan sesuai prinsip akuntansi sektor publik dan petunjuk teknis yang berlaku, menggunakan basis kas yang terintegrasi secara digital melalui aplikasi ARKAS. Tahapannya dimulai dari penyusunan RKAS yang melibatkan komite, pencatatan transaksi harian ke dalam Buku Kas Umum, hingga penyusunan laporan realisasi anggaran yang divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana.

Pencatatan dan pelaporan yang tertib tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban keuangan, khususnya pada dimensi vertikal kepada pemerintah, sebagaimana dibuktikan oleh kesesuaian hasil revidi Inspektorat dengan kondisi riil di lapangan. Akan tetapi, akuntabilitas horizontal kepada masyarakat dan orang tua siswa masih memerlukan penguatan, mengingat penyajian informasi keuangan secara terbuka masih terbatas pada forum internal dan belum menjangkau media publikasi yang lebih luas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya meliputi satu satuan pendidikan, sehingga temuannya belum tentu dapat digeneralisasi pada sekolah dasar lain dengan karakteristik sumber daya dan tata kelola yang berbeda. Bagi SDN 90 Rakadua, disarankan agar mulai mempublikasikan ringkasan realisasi anggaran melalui papan informasi sekolah atau kanal komunikasi wali murid untuk memperkuat akuntabilitas horizontal. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana, disarankan memberikan pendampingan teknis berkelanjutan terkait pemutakhiran aplikasi ARKAS sekaligus jaminan perlindungan bagi sekolah yang melakukan transparansi anggaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Jumianti. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal.
- Mardiasmo. 2012. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mellani. 2016. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombong Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016. Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Monika Jayatri. 2012. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo. Jurnal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Pramita, Z. E. 2015. Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal. Jurnal, Universitas Negeri Semarang.
- Priansa, D. J. 2017. Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Jakarta: Erlangga.
- Riseda, J. 2022. Analisis Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Jurnal.
- Sri Hartatik. 2018. Analisa Laporan Dana BOS pada SMTK Luks Cornellia Kota Sorong. Jurnal, Program Studi Diploma IV Akuntansi Keuangan Publik.
- Strauss, A., & Corbin, J. 2013. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Ujimaviati, R. 2019. Analisis Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kota Tegal. Jurnal.
- Wardah Ges Alamudy. 2020. Analisis Pencatatan Akuntansi pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi Kasus di SMK Negeri 1 Lunyuk. Jurnal, Universitas Teknologi Sumbawa.
- Wulan. 2021. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 014746 Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Jurnal.